

## WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
  Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan
  Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir pada Dinas
  Perhubungan Kota Bengkulu tidak sesuai dengan kondisi
  yang ada;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
  Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
  Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  1091);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU.

#### Pasal I

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 5 huruf f dihapus, huruf i diubah, 1. sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

UPTD Parkir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana teknis operasional Parkir. a.
- penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang b. pengelolaan perparkiran.
- penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan c. publik dan standar operasional prosedur.
- d. penataan titik parkir di Kota Bengkulu
- penentuan titik Parkir baru. e.
- f. dihapus
- pengawasaan terhadap juru parkir. g.
- h. pengadaan kelengkapan juru parkir.
- i. pemerosesan rekomendasi Surat Perintah Tugas Juru Parkir.
- mengusulkan sarana dan prasarana parkir. i.
- k. pengawasan pada zona-zona Parkir.
- 1. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

- n. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- 2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 15

Pemungutan retribusi parkir masih dilaksanakan oleh UPTD Parkir sampai dengan Desember 2019 untuk selanjutnya beralih kepada Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 57